

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Data

Secara geografis Kabupaten Bengkulu Tengah terletak diantara koordinat 102° 11' 24"-102° 37' 12" Bujur Timur dan 3° 28' 48"-3° 51' 36" Lintang Selatan. Sedangkan secara administrasi, wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan bagian dari wilayah Provinsi Bengkulu.

Adapun batas-batas Kabupaten Bengkulu Tengah adalah:

Sebelah Utara : Kabupaten Bengkulu Utara;

Sebelah Timur : Kabupaten Kepahiang;

Sebelah Selatan : Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu; dan

Sebelah Barat : Kota Bengkulu dan Samudera Indonesia.

Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki luas wilayah berdasarkan data dan informasi geografis seluas 122.394 hektar, yang meliputi 10 (sepuluh) Kecamatan, 132 (seratus tiga puluh dua) desa, dan 1 (satu) kelurahan.

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2013

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Karang Tinggi	19.128,72	11.320
2.	Talang Empat	3.914,36	13.716
3.	Pondok Kelapa	13.098,12	25.911
4.	Pematang Tiga	11.556,45	6.935
5.	Pagar Jati	5.362,84	5.768
6.	Taba Penanjung	30.473,47	10.959
7.	Pondok Kubang	4.661,61	8.220
8.	Bang Haji	9600,99	6.218
9.	Merigi Kelindang	12.085,10	6.341
10.	Merigi Sakti	12.512,34	5.640
Jumlah		122.394,00	104.188

Sumber : Bengkulu Tengah Dalam Angka, BPS

Tabel 4.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkulu Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2012 (Juta Rupiah)

SEKTOR	2010	2011	2012
Pertanian	312,037.35	349,355.81	386,477.16
Pertambangan dan penggalian	191,689.18	231,632.65	270,213.43
Industri pengolahan	45,091.12	48,399.26	54,562.18
Listrik, gas dan air bersih	1,109.96	1,222.81	1,352.07
Bangunan	35,819.22	41,166.12	48,492.97
Perdagangan, hotel dan restoran	110,859.95	122,499.46	139,879.71
Pengangkutan dan komunikasi	37,283.92	42,706.58	47,910.12
Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	38,499.03	44,094.21	52,610.64
Jasa-jasa	96,119.69	108,761.65	122,855.80
P D R B	868,509.41	989,838.55	1,124,354.7

Sumber: Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Angka, BPS

Pondok Kelapa adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu, Indonesia, dan berbatasan dengan kecamatan lain yaitu :

Sebelah Utara : Kecamatan Air Napal.

Sebelah selatan : Kota Bengkulu.

Sebelah barat : Samudra Indonesia

Sebelah Timur : Kecamatan Talang Empat, Kecamatan Pagar Jati dan Kecamatan Pematang Tiga.

Kecamatan Pondok Kelapa dengan luas wilayah 13.098 Ha yang terdiri dari 17 (tujuh belas) desa. Dengan jumlah penduduk yang tercatat pada tahun 2013 sebanyak 25.911 jiwa dengan kepadatan 173,18/Km². Jarak Kecamatan Pondok Kelapa dengan pusat kota Bengkulu Tengah 7 Km, dan

dengan pusat ibu kota provinsi 5 Km dengan ketinggian tempat bervariasi dari 0 – 1.000 M Dpl dengan suhu rata-rata 28° C.

4.1.2 Alur Tahapan Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 9 tahun 1982, pelaksanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui suatu proses yang relatif baku yaitu Proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan (P5D). Proses P5D dimulai dari tingkat bawah (masyarakat) dalam bentuk Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes), yang kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di tingkat Kecamatan, Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) Kabupaten, Rakorbang Propinsi, dan berakhir dengan Rakorbang Nasional.

Tabel 4.3. Tujuan, Agenda, Keluaran, dan peserta pada setiap tahapan P5D

Tahapan	Agenda	Peserta
Musbangdes/ Musbang Kelurahan	• Mengidentifikasi potensi dan masalah kunci di desa • Perumusan usulan rencana kegiatan pembangunan desa • Prioritasi usulan kegiatan pembangunan • Pemilahan/kategorisasi kegiatan berdasarkan sumber pendanaan	Kepala Desa, LKMD, BPD, Kadus, PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat anggota masyarakat
Diskusi UDKP/ Musbang Kecamatan	• Identifikasi & kompilasi hasil-hasil Musbangdes • Prioritasi usulan kegiatan pembangunan • Pemilahan/kategorisasi kegiatan berdasarkan sumber pendanaan	Dinas/Badan/ Lembaga tingkat Kecamatan, Camat, Muspika, Kades/Lurah, Ketua LKMD, Ketua BPD, PKK
Rakorbang Kabupaten	• Identifikasi & kompilasi hasil-hasil Musbang Kecamatan • Identifikasi & kompilasi daftar usulan Proyek (DURP) Dinas/Instansi • Prioritasi usulan kegiatan pembangunan • Pemilahan/kategorisasi	Dinas/Badan/ Lembaga tingkat Kabupaten, Bupati, Muspida, Camat, PKK

kegiatan berdasarkan sumber
pendanaan

Sumber: Permendagri, 1982

Menurut Ichwanto, M.Ap (2010), Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah pembangunan tahunan para pemangku kepentingan (stake holders) di tingkat Kecamatan untuk menentukan prioritas dan memantapkan usulan kegiatan pembangunan masing-masing desa/kelurahan di Kecamatan yang bersangkutan sekaligus menyepakati rencana kegiatan lintas desa/Kelurahan dan Kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan Rencana Kerja SKPD kabupaten pada tahun berikutnya.

Pada musrenbang kecamatan, usulan dari desa/kelurahan diklasifikasikan dan didiskusikan sehingga akan didapatkan kegiatan prioritas pada tingkat kecamatan yang harus dilaksanakan pada tahun bersangkutan serta kegiatan lain yang masih bisa ditanggguhkan pelaksanaannya. Formulasi yang sudah terpilah secara rinci kemudian disampaikan secara formal dalam forum SKPD agar terjadi sinkronisasi program/kegiatan dengan SKPD terkait. Pada Musrenbang Kecamatan peran SKPD melalui perwakilannya adalah memberikan arahan dan mendetailkan usulan dari hasil Musrenbang desa/Kelurahan dalam rangka memantapkan usulan dari masing-masing kelurahan.

Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan bahan masukan paling penting bagi SKPD Kota Blitar dalam Forum SKPD untuk menyusun usulan kegiatan yang akan disampaikan dalam Musrenbang Kabupaten. Dengan daftar kebutuhan masyarakat yang telah direkapitulasi dalam Musrenbang Kecamatan, SKPD terkait dapat dengan mudah menentukan prioritas dan proporsionalitas antara kebutuhan masyarakat yang mendesak dengan kebutuhan prioritas SKPD sendiri.

Musrenbang Kecamatan diselenggarakan bertujuan untuk:

- Menampung dan membahas usulan kegiatan prioritas desa/kelurahan yang diperoleh dari Musrenbang desa/kelurahan sehingga seyogyanya dalam Musrenbang Kecamatan tidak muncul usulan kegiatan baru selain usulan dari Kelurahan terkecuali usulan baru yang benar-benar prioritas (darurat) dan tidak lebih berjumlah 5 % dari keseluruhan usulan Kelurahan.
- Menyusun, memvalidasi dan menetapkan kembali usulan kegiatan dari masing-masing desa/kelurahan sesuai dengan prioritas penanganannya serta sumber-sumber pembiayaannya baik melalui alokasi dana Kecamatan yang berasal dari APBD Kabupaten maupun sumber pendanaan lainnya atas pertimbangan SKPD terkait.
- Menetapkan usulan kegiatan prioritas kecamatan yang akan diajukan dan dibahas pada forum SKPD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.
- Menetapkan wakil/delegasi kecamatan yang akan mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.

Hal-hal yang disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan adalah:

1. Dari Kecamatan

- Daftar usulan prioritas kelurahan hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan (maksimal 50 kegiatan).
- Daftar permasalahan Kecamatan (peta kerawanan, kemiskinan, pengangguran dan permasalahan fisik maupun non fisik lainnya).
- Dokumen Rencana Strategis Kecamatan, Rencana Kerja Tahunan Kecamatan tahun sebelumnya.
- Hasil Evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Kecamatan pada tahun sebelumnya.

2. Dari Kabupaten

- Format bantu usulan kegiatan untuk memudahkan Kecamatan menyampaikan usulan kegiatan prioritas ke tingkat Kabupaten.

- Hasil evaluasi Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan atau masyarakat terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Kecamatan pada tahun sebelumnya.
- Informasi dari Pemerintah Kabupaten tentang indikasi atau perkiraan jumlah Alokasi Dana Kecamatan.
- Kegiatan prioritas SKPD untuk tahun mendatang yang akan dilaksanakan di Kecamatan yang bersangkutan.

Beberapa keluaran yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan adalah :

1. Daftar usulan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan dipilah atau dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :
 - a. Usulan kegiatan pembangunan yang akan dikerjakan oleh Kecamatan (melalui PKMK dsb) diluar kegiatan prioritas yang diusulkan kepada SKPD;
 - b. Usulan kegiatan yang direkomendasikan untuk ditampung SKPD sebagai kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dengan biaya APBD maupun sumber-sumber pendanaan yang lain untuk dibahas pada forum Musrenbang tingkat Kabupaten dengan jumlah kegiatan prioritas maksimal 100 kegiatan.
 - c. Mengklasifikasikan usulan kegiatan sesuai dengan arahan kebijakan umum tahun 2011 dan kelompok urusan pemerintahan daerah dan organisasi dalam Permendagri 59/2007.

Kegiatan yang bukan merupakan prioritas (diluar poin b) diatas tetap diakomodasikan sebagai data base pembangunan tingkat Kabupaten untuk kemudian diusahakan menjadi prioritas pada pelaksanaan Musrenbang tahun berikutnya.

2. Selanjutnya, daftar tersebut juga disosialisasikan kepada masing-masing desa/kelurahan oleh para wakilnya yang mengikuti Musrenbang Kecamatan.
3. Daftar Usulan Program/Kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan harus sudah dibuat dan disampaikan ke Bappeda Kabupaten serta ke SKPD

terkait paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

4. Untuk usulan program/kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang akan disampaikan ke SKPD terkait adalah usulan yang mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD sebagai bahan untuk pelaksanaan forum SKPD.

5. Dipilihnya wakil/delegasi Kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD Musrenbang Kabupaten.

Tahapan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terdiri dari:

A. Tahap Persiapan

- Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan dengan menerbitkan SK Camat.
- Kecamatan menyampaikan jadwal pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan pada wilayahnya masing-masing ke Bappeda Kabupaten pada awal bulan Januari.
- Kecamatan mengusahakan dengan sungguh-sungguh agar pelaksanaan musrenbang tingkat desa/Kelurahan dan Kecamatan sudah berakhir setidaknya-tidaknya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan musrenbang tingkat Kabupaten.
- Menyusun agenda acara musrenbang Kecamatan.

B. Tahap Pelaksanaan

- Tim penyelenggara menyusun bahan, menyampaikan pengumuman dan menyelenggarakan Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- Pemaparan Camat mengenai masalah utama Kecamatan (kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pengangguran).
- Pemaparan Kepala UPTD atau SKPD mengenai rancangan Rencana Kerja SKPD di tingkat Kecamatan beserta strategi dan plafon dana.
- Pemaparan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan tentang masalah utama dan kegiatan prioritas dari masing – masing desa/kelurahan menurut fungsi SKPD.

- Verifikasi oleh delegasi desa/kelurahan untuk memastikan semua kegiatan prioritas yang diusulkan oleh desa/kelurahan sudah tercantum menurut masing – masing SKPD.
- Penentuan kriteria kegiatan prioritas pembangunan kecamatan untuk masing – masing fungsi SKPD atau gabungan SKPD yang difasilitasi oleh Tim Fasilitator Musrenbang Kecamatan.
- Pembagian peserta Musrenbang ke dalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah fungsi / SKPD atau gabungan SKPD yang telah tercantum.
- Pelaksanaan diskusi kelompok yang didampingi oleh nara sumber, Tim Fasilitator Musrenbang desa/Kelurahan dan Tim Fasilitator Musrenbang Kecamatan.
- Penentuan kesepakatan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta Musrenbang namun belum diusulkan oleh kelurahan dalam sidang pleno atau sidang khusus.
- Kesepakatan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan berdasarkan masing – masing fungsi / SKPD.
- Pemaparan prioritas pembangunan kecamatan dari tiap – tiap kelompok fungsi / SKPD atau gabungan SKPD di hadapan seluruh peserta Musrenbang Kecamatan.

Peserta Musrenbang Kecamatan adalah perwakilan dari desa dan wakil dari kelompok–kelompok masyarakat dalam skala Kecamatan.

Narasumber terdiri dari:

- a. Kota/Kabupaten terdiri dari Bappeda, perwakilan SKPD, Kepala UPTD, anggota DPRD dari daerah pilihan Kecamatan tersebut. Untuk anggota DPRD, forum ini bisa menjadi forum untuk penjangkaran aspirasi masyarakat.
- b. Dari Kecamatan terdiri dari Camat dan aparat Kecamatan.

Tugas Tim Penyelenggara yaitu:

- a. Merekapitulasi hasil dari seluruh Musrenbang Kelurahan.
- b. Menyusun jadwal dan agenda kegiatan yang kemudian mengumumkannya secara terbuka.
- c. Memfasilitasi proses pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
- d. Membantu wakil/delegasi kecamatan dalam menjalankan tugasnya di forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.
- e. Merangkum daftar kegiatan prioritas pembangunan di Kecamatan untuk dibahas pada forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.
- f. Mengkompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari masing-masing Kecamatan berdasarkan sumber pembiayaan dan tanggungjawab SKPD.
- g. Mengklasifikasikan dan membagi usulan dari masing-masing kelurahan (50 usulan prioritas) sesuai dengan misi masing-masing kelompok diskusi.
- h. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan dan mengumumkannya secara terbuka minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan.
- i. Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kecamatan.
- j. Menyiapkan kegiatan Musrenbang Kecamatan (tempat, materi, bahan, notulen, dsb).
- k. Menunjuk penyaji, moderator dan notulen untuk diskusi kelompok berdasarkan kelompok urusan pemerintahan.
- l. Merangkum Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan yang sekurang-kurangnya memuat kegiatan prioritas yang disepakati dan daftar nama wakil yang dipilih untuk mengikuti pembahasan dalam forum SKPD dan Musrenbang tingkat Kabupaten.
- m. Menyampaikan Berita Acara tersebut kepada anggota DPRD dari Daerah Pilihan Kecamatan tersebut sebagai referensi dalam forum pembahasan Panitia Anggaran DPRD.

Tugas Wakil / Delegasi Kecamatan adalah:

- a. Membantu Tim Penyelenggara menyusun daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan untuk dibahas pada forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.
- b. Memperjuangkan kegiatan prioritas pembangunan Kecamatan dalam forum SKPD dan Musrenbang.
- c. Mengambil inisiatif untuk membahas perkembangan usulan Kecamatan dengan wakil desa/Kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat di Kecamatan.
- d. Mendiskusikan berita acara hasil Musrenbang Kecamatan dengan anggota DPRD dari daerah pemilihan Kecamatan yang bersangkutan.
- e. Setelah mendapat kepastian tentang berbagai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kecamatan oleh masing-masing SKPD, maka Tim Penyelenggara di Kecamatan dan wakil Kecamatan membantu Camat mengumumkan program-program pembangunan yang dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap realisasi dari berbagai usulan kegiatan tersebut.

4.1.3 Karakteristik Responden

Pada tabel 4.4 terlihat mayoritas masyarakat yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian mempunyai karakteristik sebagai berikut: umur antara 30-39 tahun (42,5%), pendidikan terakhir adalah SLTA (10%), pekerjaan adalah petani (35%), dan jenis kelamin adalah laki laki (31%).

Tabel 4.4. Karakteristik Responden Penelitian

	Karakteristik	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Umur	20-29 Tahun	4	10
	30-39 Tahun	17	42,5
	40-49 Tahun	16	40
	≥ 50 Tahun	3	7,5
	Jumlah	40	100.00
Pendidikan	SD	4	2%
	SLTP	6	48%

	SLTA	22	10%
	Perguruan Tinggi	8	38%
	Jumlah	40	100.00
Pekerjaan	PNS	9	22,5
	Pedagang	13	32,5
	Petani	14	35
	Tidak Bekerja	4	10
	Jumlah	40	100.00
Jenis Kelamin	Laki-laki	31	77,5
	Perempuan	9	22,5
	Jumlah	40	100.00

Sumber : Hasil Penelitian Diolah, 2014

4.1.4 Hasil Perhitungan

Berdasarkan kepada konsep dan teori yang telah dikemukakan di bab 2, perencanaan partisipatif ditetapkan dalam enam dimensi sebagai berikut:

1. Fokus pada kepentingan masyarakat
2. Partisipatoris
3. Dinamis
4. Sinergitas
5. Legalitas
6. Fisibilitas

Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dengan berbagai dimensi dan indikator dapat dilihat dari pernyataan responden yang mengungkapkan penilaian terhadap seluruh indikator.

4.1.4.1.Fokus Pada Kepentingan Masyarakat

Perencanaan partisipatif dilihat dari dimensi fokus kepada kepentingan masyarakat diukur dengan 4 indikator yaitu:

1. Perencanaan partisipatif memperhatikan masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat
2. Perencanaan partisipatif memperhatikan aspirasi masyarakat
3. Perencanaan partisipatif memperhatikan motivasi dan peran serta kelompok

4. Perencanaan partisipatif memperhatikan rasa memiliki pada kelompok

Untuk mengukur keempat indikator diatas digunakan skala likert yang didapat dari nilai enam pertanyaan yang diajukan kepada responden. Berikut tabel tanggapan responden terhadap dimensi fokus pada kepentingan masyarakat.

Tabel 4.5. Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Fokus Pada Kepentingan Masyarakat

No	Pernyataan	Jawaban					Total
	Tentang	SB	B	CB	KB	SKB	
1	Perencanaan partisipatif mengatasi/ membantu menyelesaikan masalah masyarakat	6	10	11	12	1	40
2	Perencanaan partisipatif berjalan dengan baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada	6	11	9	10	4	40
3	Perencanaan partisipatif memperhatikan aspirasi masyarakat	4	8	9	16	3	40
4	Perencanaan partisipatif meningkatkan motivasi kelompok masyarakat	2	8	10	17	3	40
5	Perencanaan partisipatif meningkatkan kelompok dalam kebijakan program pembangunan	4	10	10	11	5	40
6	Perencanaan partisipatif dapat menimbulkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan	2	10	12	12	4	40

Total	24	57	61	78	20	240
Persentase (%)	10	23,75	25,42	32, 50	8,30	100

Sumber: Hasil Penelitian

Dari pernyataan pada Tabel 4.5, sebanyak 32,50% responden memberikan tanggapan bahwa pelaksanaan perencanaan partisipatif dari dimensi fokus pada kepentingan masyarakat menilai kurang baik, sedangkan sebanyak 8,30% responden menilai sangat kurang baik.

Tabel 4.6. Nilai Rata-rata Tanggapan Responden Terhadap Fokus Perencanaan Partisipatif Terhadap Kepentingan Masyarakat

No	Pernyataan Tentang	Skor Total	Rata- rata	Ketera- ngan
1	Perencanaan partisipatif mengatasi/ membantu menyelesaikan masalah masyarakat	128	3,20	Sedang
2	Perencanaan partisipatif berjalan dengan baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada	125	3,13	Sedang
3	Perencanaan partisipatif memperhatikan aspirasi masyarakat	114	2,85	Sedang
4	Perencanaan partisipatif meningkatkan motivasi kelompok masyarakat	109	2,73	Sedang
5	Perencanaan partisipatif meningkatkan kelompok dalam kebijakan program pembangunan	117	2,93	Sedang
6	Perencanaan partisipatif dapat menimbulkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan	114	2,85	Sedang
Nilai rata-rata dimensi fokus pada kepentingan masyarakat			2,95	Sedang

Sumber: Hasil Penelitian

Hasil ukur: 1-1,80 = Sangat Rendah, 1,81-2,61 = Rendah, 2,62-3,42 = Sedang,
3,43-4,23 = Tinggi, 4,24-5 = Tinggi

Dari Tabel 4.6 terlihat bahwa jika dilihat dari dimensi fokus pada kepentingan masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan

Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sedang (2,95) atau berada pada kisaran nilai 2,62-3,42.

4.1.4.2.Partisipatoris

Untuk mengukur indikator partisipatoris digunakan satu pertanyaan mengenai pemberian sumbangan pemikiran tanpa ada hambatan apapun. Berikut ini hasil dari tanggapan responden mengenai perencanaan partisipatif dari dimensi partisipatoris:

Tabel 4.7. Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Partisipatoris

No	Pernyataan	Jawaban					Total
	Tentang	SB	B	CB	KB	SKB	
7	perencanaan partisipatif berjalan dengan baik dalam hal memberikan kesempatan yang sama dalam memberikan sumbangan pemikiran tanpa ada hambatan apapun	0	4	12	15	9	40
Total		0	4	12	15	9	40
Persentase (%)		0	10,00	30,00	37,50	22,50	100

Sumber: Hasil Penelitian

Dari pernyataan pada Tabel 4.7, sebanyak 37,50% responden memberikan tanggapan bahwa pelaksanaan perencanaan partisipatif dari dimensi partisipatoris menilai kurang baik, sedangkan tidak ada responden menilai sangat baik.

Dari Tabel 4.8 terlihat bahwa jika dilihat dari dimensi partisipatoris, tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah adalah rendah karena memiliki nilai rata-rata 2,28 atau berada pada kisaran nilai 1,81-2,61.

Tabel 4.8. Nilai Rata-rata Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Partisipatoris Perencanaan Partisipatif

No	Pernyataan Tentang	Skor Total	Rata-rata	Keterangan
7	perencanaan partisipatif berjalan dengan baik dalam hal memberikan kesempatan yang sama dalam memberikan sumbangan pemikiran tanpa ada hambatan apapun	91	2,28	Rendah
Nilai rata-rata dimensi Partisipatoris			2,28	Rendah

Sumber: Hasil Penelitian

Hasil ukur: 1-1,80 = Sangat Rendah, 1,81-2,61 = Rendah, 2,62-3,42 = Sedang, 3,43-4,23 = Tinggi, 4,24-5 = Tinggi

4.1.4.3. Dinamis

Perencanaan partisipatif dari dimensi dinamis diukur dengan satu indikator yaitu pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan perencanaan partisipatif berjalan baik dan berkelanjutan serta adanya proaktif dari masyarakat. Berikut hasil penelitian dari dimensi dinamis:

Tabel 4.9. Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Dinamis

No	Pernyataan Tentang	Jawaban					Total
		SB	B	CB	KB	SKB	
8	Perencanaan partisipatif berlangsung dengan baik secara berkelanjutan	0	5	9	14	12	40
9	Perencanaan partisipatif dapat meningkatkan proaktif masyarakat	2	2	12	12	12	40
Total		2	7	21	26	24	80
Persentase (%)		2,50	8,75	26,25	32,5	30	100

Sumber: Hasil Penelitian

Dari pernyataan pada Tabel 4.9, sebanyak 32,50% responden memberikan tanggapan bahwa pelaksanaan perencanaan partisipatif dari dimensi dinamis menilai kurang baik, sedangkan hanya 2,50% responden menilai sangat baik.

Kemudian dari Tabel 4.10 terlihat bahwa jika dilihat dari dimensi dinamis, tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah adalah rendah karena memiliki nilai rata-rata 2,21 atau berada pada kisaran nilai 1,81-2,61

Tabel 4.10. Nilai Rata-rata Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Dinamis

No	Pernyataan	Skor Total	Rata-rata	Keterangan
	Tentang			
	Perencanaan partisipatif			
8	berlangsung dengan baik secara berkelanjutan	87	2,18	Rendah
9	Perencanaan partisipatif dapat meningkatkan proaktif masyarakat	90	2,25	Rendah
Nilai rata-rata dimensi Dinamis			2,21	Rendah

Sumber: Hasil Penelitian

Hasil ukur: 1-1,80 = Sangat Rendah, 1,81-2,61 = Rendah, 2,62-3,42 = Sedang, 3,43-4,23 = Tinggi, 4,24-5 = Tinggi

4.1.4.4. Sinergitas

Jika dilihat dari dimensi sinergitas, perencanaan partisipatif diukur dengan empat faktor yaitu:

1. Dalam hal menjamin keterlibatan semua pihak
2. Dalam hal meningkatkan kerjasama antar wilayah administrasi
3. Perhatian terhadap interaksi antar stakeholders di daerah
4. Perhatian terhadap kepentingan-kepentingan strategis daerah

Dari pernyataan pada Tabel 4.11, sebanyak 36,25% responden memberikan tanggapan bahwa pelaksanaan perencanaan partisipatif dari dimensi sinergitas menilai kurang baik, sedangkan hanya sebanyak 2,50% responden menilai sangat baik.

Kemudian dari Tabel 4.12 terlihat bahwa jika dilihat dari dimensi sinergitas, tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah adalah rendah karena memiliki nilai rata-rata 2,45 atau berada pada kisaran nilai 1,81-2,61.

Tabel 4.11. Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Sinergitas dalam Perencanaan Partisipatif

No	Pernyataan	Jawaban					Total
	Tentang	SB	B	CB	KB	SKB	
10	Perencanaan partisipatif menjamin keterlibatan semua pihak	0	4	12	17	7	40
11	Perencanaan partisipatif meningkatkan kerjasama antar wilayah administrasi	1	4	15	13	7	40
12	Perencanaan partisipatif memperhatikan interaksi diantara stakeholders di daerah	2	4	13	14	7	40
13	Perencanaan partisipatif memperhatikan kepentingan strategis daerah	1	3	16	14	6	40
Total		4	15	56	58	27	160
Persentase (%)		2,50	9,38	35,00	36,25	16,88	100

Sumber: Hasil Penelitian

Tabel 4.12. Nilai Rata-rata Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Sinergitas dalam Perencanaan Partisipatif

No	Pernyataan	Skor Total	Rata-rata	Keterangan
	Tentang			
10	Perencanaan partisipatif menjamin keterlibatan semua pihak	93	2,33	Rendah
11	Perencanaan partisipatif meningkatkan kerjasama antar wilayah administrasi	99	2,48	Rendah
12	Perencanaan partisipatif memperhatikan interaksi diantara stakeholders di daerah	100	2,50	Rendah
13	Perencanaan partisipatif memperhatikan kepentingan strategis daerah	99	2,48	Rendah
Nilai rata-rata dimensi Sinergitas			2,45	Rendah

Sumber: Hasil Penelitian

Hasil ukur: 1-1,80 = Sangat Rendah, 1,81-2,61 = Rendah, 2,62-3,42 = Sedang, 3,43-4,23 = Tinggi, 4,24-5 = Tinggi

4.1.4.5. Legalitas

Untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam dimensi legalitas digunakan tiga indikator yaitu:

1. Pelaksanaan perencanaan partisipatif mengacu pada semua peraturan yang berlaku
2. Menjunjung tinggi etika dan tata nilai masyarakat
3. Tidak memberikan peluang dalam penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan

Dari pernyataan pada Tabel 4.13, sebanyak 38,33% responden memberikan tanggapan bahwa pelaksanaan perencanaan partisipatif dari dimensi

Legalitas menilai cukup baik, sedangkan hanya sebanyak 4,17% responden menilai sangat baik.

Sedangkan dari Tabel 4.14 terlihat bahwa jika dilihat dari dimensi legalitas, tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sedang karena memiliki nilai rata-rata 2,85 atau berada pada kisaran nilai 2,62 – 3,42.

Berikut tanggapan responden dari dimensi legalitas dalam perencanaan partisipatif:

Tabel 4.13. Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Legalitas dalam Perencanaan Partisipatif

No	Pernyataan	Jawaban					Total
	Tentang	SB	B	CB	KB	SKB	
14	perencanaan partisipatif sesuai dengan peraturan yang berlaku	0	8	17	12	3	40
15	Perencanaan partisipatif Menjunjung tinggi etika dan tata nilai masyarakat	4	8	16	11	1	40
16	Perencanaan partisipatif menekan peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan	1	9	13	12	5	40
Total		5	25	43	35	9	120
Persentase (%)		4,17	20,83	38,33	29,17	7,50	100

Sumber: Hasil Penelitian

Tabel 4.14. Nilai Rata-rata Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Legalitas dalam Perencanaan Partisipatif

No	Pernyataan Tentang	Skor Total	Rata-rata	Keterangan
14	perencanaan partisipatif sesuai dengan peraturan yang berlaku	110	2,75	Sedang
15	Perencanaan partisipatif Menjunjung tinggi etika dan tata nilai masyarakat	123	3,08	Sedang
16	Perencanaan partisipatif menekan peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan	109	2,73	Sedang
Nilai rata-rata dimensi Legalitas			2,85	Sedang

Sumber: Hasil Penelitian

Hasil ukur: 1-1,80 = Sangat Rendah, 1,81-2,61 = Rendah, 2,62-3,42 = Sedang, 3,43-4,23 = Tinggi, 4,24-5 = Tinggi

4.1.4.6. Fisibilitas

Untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam dimensi Fisibilitas digunakan dua indikator yaitu:

1. Spesifikasi dan ukuran dalam perencanaan partisipatif
2. Perencanaan partisipatif dilihat dari waktu yang digunakan

Dari pernyataan pada Tabel 4.15, sebanyak 45,00% responden memberikan tanggapan bahwa pelaksanaan perencanaan partisipatif dari dimensi fisibilitas menilai cukup baik, sedangkan hanya sebanyak 2,50% responden menilai sangat baik.

Kemudian dari Tabel 4.16 terlihat bahwa jika dilihat dari dimensi fisibilitas, tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sedang karena memiliki nilai rata-rata 2,91 atau berada pada kisaran nilai 2,62 – 3,42.

Tabel 4.15. Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Fisibilitas dalam Perencanaan Partisipatif

No	Pernyataan	Jawaban					Total
	Tentang	SB	B	CB	KB	SKB	
17	perencanaan partisipatif sesuai spesifikasi dan ukuran yang sebenarnya	1	10	18	7	4	40
18	Perencanaan partisipatif sesuai dengan waktu yang ditentukan	1	9	18	8	4	40
Total		2	19	36	15	8	80
Persentase (%)		2,50	23,75	45,00	18,75	10,0	100

Sumber: Hasil Penelitian

Tabel 4.16. Nilai Rata-rata Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Fisibilitas dalam Perencanaan Partisipatif

No	Pernyataan	Skor Total	Rata-rata	Keterangan
	Tentang			
17	perencanaan partisipatif sesuai spesifikasi dan ukuran yang sebenarnya	117	2,93	Sedang
18	Perencanaan partisipatif sesuai dengan waktu yang ditentukan	115	2,88	Sedang
Nilai rata-rata dimensi Fisibilitas			2,91	Sedang

Sumber: Hasil Penelitian

Hasil ukur: 1-1,80 = Sangat Rendah, 1,81-2,61 = Rendah, 2,62-3,42 = Sedang, 3,43-4,23 = Tinggi, 4,24-5 = Tinggi

Sedangkan dari keseluruhan dimensi yang ada, nilai rata-rata tanggapan responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4.17. Nilai Rata-rata Tanggapan Responden Terhadap Semua Dimensi

No	Dimensi	Rata-rata	Keterangan
1	Fokus pada kepentingan masyarakat	2,95	Sedang
2	Partisipatoris	2,28	Rendah
3	Dinamis	2,21	Rendah
4	Sinergitas	2,45	Rendah
5	Legalitas	2,85	Sedang
6	Fisibilitas	2,91	Sedang
Total Nilai Rata-rata		2,61	Rendah

Sumber: Hasil Penelitian

Hasil ukur: 1-1,80 = Sangat Rendah, 1,81-2,61 = Rendah, 2,62-3,42 = Sedang, 3,43-4,23 = Tinggi, 4,24-5 = Tinggi

Dari Tabel 4.17 terlihat bahwa jika dilihat dari nilai rata-rata keseluruhan dimensi, tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah adalah rendah karena memiliki nilai rata-rata 2,61 atau berada pada kisaran nilai 1,81-2,61

4.2. Pembahasan

4.2.1. Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Masyarakat

Dari hasil penelitian untuk menganalisa tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Jika dilihat dari dimensi:

1. Fokus pada kepentingan masyarakat,

Indikator yang memiliki peranan terbesar dalam menentukan tingkat partisipasi masyarakat adalah indikator “perencanaan partisipatif mengatasi dan membantu menyelesaikan masalah masyarakat”, hal ini berarti perencanaan partisipatif tersebut cukup memperhatikan dan menyelesaikan semua masalah yang ada di masyarakat. Sedangkan indikator yang memiliki pengaruh terkecil dalam menentukan tingkat

partisipasi masyarakat di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah adalah indikator “perencanaan partisipatif untuk meningkatkan motivasi masyarakat”, hal ini berarti perencanaan partisipatif yang dilaksanakan di Kecamatan Pondok Kelapa cukup dapat meningkatkan motivasi kelompok masyarakat yang ada di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Dari setiap pertanyaan yang diajukan kepada responden menyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan jika dilihat dari dimensi fokus pada kepentingan masyarakat adalah sedang, hal ini berarti tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Pondok Kelapa masih dalam kategori yang cukup dalam merencanakan perencanaan yang berdasarkan pada kepentingan masyarakat. Hal ini dapat ditingkatkan kembali dengan cara sering mengadakan musyawarah dalam setiap perencanaan pembangunan di Desa maupun di Kecamatan Pondok Kelapa dengan mengundang tidak hanya perwakilan dari pemerintahan Desa atau Kecamatan saja, tetapi juga mengundang semua perwakilan yang ada di masyarakat sehingga dapat menampung semua aspirasi yang ada di masyarakat.

2. Partisipatoris,

Dari indikator mengenai “perencanaan partisipatif berjalan dengan baik dalam hal memberikan kesempatan yang sama dalam memberikan sumbangan pemikiran tanpa ada hambatan apapun”, hasil yang didapat dalam menentukan tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah adalah rendah, hal ini berarti bahwa masyarakat kurang di beri kesempatan untuk menyampaikan sumbangan pemikiran dan ide-ide dalam setiap perencanaan pembangunan yang di laksanakan di setiap Musyawarah desa atau Kecamatan, karena kebanyakan masih di ambil alih oleh beberapa perwakilan saja, seperti perangkat pemerintahan di Desa maupun Kecamatan. Hal ini harus segera diubah dengan cara lebih memprioritaskan sumbangan pemikiran dan ide-ide dari setiap perwakilan masyarakat yang ada di Desa, bukan hanya dari beberapa

orang saja, sehingga dapat tercapai perencanaan pembangunan yang didasarkan dari keinginan masyarakat di desa itu sendiri.

3. Dinamis,

Dari indikator mengenai “perencanaan partisipatif berlangsung dengan baik secara berkelanjutan dan dapat meningkatkan proaktif masyarakat”, hasil yang didapat dalam menentukan tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah adalah rendah, hal ini berarti tingkat partisipasi masyarakat masih kurang dalam hal pelaksanaan perencanaan yang berkelanjutan dan dapat meningkatkan proaktif masyarakat, hal ini harus dapat ditingkatkan dengan lebih melaksanakan perencanaan partisipatif yang lebih baik dan berkelanjutan serta dapat meningkatkan proaktif masyarakat, semua ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk dapat hadir dalam setiap musyawarah perencanaan pembangunan di Desa maupun di Kecamatan, perangkat Desa atau Kecamatan harus bisa mencari cara agar masyarakat mau untuk terus hadir dalam setiap pelaksanaan musyawarah seperti dengan lebih mensosialisasikan pentingnya kehadiran masyarakat dalam setiap pelaksanaan musyawarah yang ada baik di Desa maupun di Kecamatan Pondok Kelapa.

4. Sinergitas,

Dari dimensi sinergitas, nilai rata-rata yang didapat dari seluruh indikator adalah rendah, hal ini berarti bahwa ptingkat partisipasi masyarakat kurang dalam hal menjamin keterlibatan semua pihak, kerjasama antar wilayah administrasi, interaksi diantara stakeholder yang ada, dan dalam kepentingan terhadap strategis daerah. Hal ini harus segera diperbaiki dengan lebih melibatkan semua pihak yang ada di masyarakat baik di Desa maupun di Kecamatan Pondok Kelapa.

5. Legalitas,

Dari indikator yang memiliki peranan terbesar dalam menentukan tingkat partisipasi masyarakat adalah indikator mengenai “perencanaan partisipatif menjunjung tinggi etika dan tata nilai masyarakat, hal ini

berarti perencanaan partisipatif cukup menjunjung tinggi etika dan tata nilai masyarakat yang ada di Desa masing-masing, sedangkan jika dilihat dari indikator “perencanaan partisipatif menekan peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan”, hasil yang didapat adalah sedang, hal ini berarti bahwa masyarakat cukup berpartisipasi dalam perencanaan dengan tidak adanya peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, tapi hal ini harus lebih diperhatikan agar kedepannya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dalam setiap pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan di Desa maupun di Kecamatan Pondok Kelapa, dengan cara masyarakat harus terus ikut berpartisipasi aktif dan ikut mengawasi agar hal yang tidak diinginkan dalam penyalahgunaan wewenang kekuasaan tersebut tidak terjadi.

6. Fisibilitas,

Dari indikator “perencanaan partisipatif sesuai spesifikasi dan ukuran yang sebenarnya” serta “perencanaan partisipatif sesuai dengan waktu yang ditentukan”, hasil yang didapat tingkat partisipasi masyarakat adalah sedang, hal ini berarti hasil dari perencanaan partisipatif cukup sesuai dengan spesifikasi dan ukuran yang diinginkan oleh masyarakat, serta juga perencanaan partisipatif sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hal ini masih dapat ditingkatkan dengan cara membuat suatu perencanaan yang lebih terperinci baik dari jenis perencanaan, spesifikasi, hingga waktu pelaksanaan.

Dari keseluruhan dimensi yang ada, tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah adalah rendah, ini berarti tingkat partisipasi masyarakat masih kurang dalam setiap pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa maupun di Kecamatan Pondok Kelapa, tetapi jika dilihat dari dimensi yang ada masih terdapat beberapa dimensi yang mengharuskan untuk ditingkatkan, seperti dari dimensi partisipatoris, dinamis dan dimensi sinergitas, hal ini harus diperhatikan oleh setiap pemerintahan yang ada di Desa maupun di

Kecamatan Pondok Kelapa agar tercapai perencanaan pembangunan yang terfokus pada kepentingan masyarakat, adanya peran aktif masyarakat, dinamis atau berkelanjutan, legal secara hukum, dapat bekerjasama dengan *stakeholders* yang ada, dan sesuai spesifikasi dan waktu yang telah ditentukan.

4.2.2. Faktor Penentu Tingkat Partisipasi Masyarakat

Sedangkan dari hasil penelitian untuk mengidentifikasi faktor penentu tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah yang berasal dari metode wawancara mendalam (*depth interview*), mayoritas responden berpendapat bahwa pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, dan latar belakang sosial budaya sangat berpengaruh sebagai faktor penentu tingkat partisipasi di Kecamatan Pondok Kelapa.

Menurut Bappeda Kabupaten Bengkulu Tengah, banyak hal yang menyebabkan masyarakat tidak ingin menghadiri rapat di desa, salah satunya adalah karena pendidikan yang rendah yang menyebabkan rasa kurang percaya diri untuk hadir, apalagi jika diminta untuk menyampaikan aspirasi maupun pendapat dalam suatu pertemuan, kebanyakan mereka yang berpendidikan rendah tidak mau melakukannya.

Selain pendidikan, Bappeda Kabupaten Bengkulu Tengah juga memberikan pendapatnya tentang faktor lain yang menghambat tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Pondok Kelapa yaitu pekerjaan. Menurut beliau, banyak masyarakat desa yang berprofesi sebagai petani lebih mengutamakan menjaga sawah dibandingkan menghadiri pertemuan di desa, dikarenakan alasan klasik yaitu urusan ekonomi keluarga.

Faktor lain yang dirasa penting menurut Bappeda Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu jenis kelamin, dari tinjauan selama ini dalam pelaksanaan musyawarah sebagian besar dihadiri oleh laki-laki, hal ini tidak terlepas dari

kurangnya kesetaraan gender yang berlaku di masyarakat, kaum perempuan dianggap lebih cocok untuk bekerja di dapur daripada keluar rumah untuk ikut berpartisipasi dalam musyawarah.

kemudian menurut Bappeda Kabupaten Bengkulu Tengah, faktor yang juga menentukan tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah adalah latar belakang sosial budaya. Hal ini bisa dilihat dari desa-desa yang ada di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, bahwa desa yang mayoritas penduduknya berasal dari luar penduduk lokal, seperti dari Jawa, maupun Bali, biasanya tingkat partisipasi masyarakat dalam menghadiri maupun ikut aktif dalam kegiatan musyawarah lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang berasal dari wilayah lokal itu sendiri. Hal ini disebabkan karena perbedaan kultur budaya dan kebiasaan yang telah mereka terima dari lahir yang dibawa dari wilayah mereka masing-masing.

Sebanding dengan pendapat Bappeda Kabupaten Bengkulu Tengah, Camat Kecamatan Pondok Kelapa juga menuturkan, bahwa pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, dan latar belakang budaya sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Khususnya di Kecamatan Pondok Kelapa.

Camat juga optimis, bahwa di masa yang akan datang, jajaran pemerintahan Kecamatan Pondok Kelapa dapat meningkatkan keyakinan seluruh masyarakat desa untuk dapat berperan aktif menghadiri dan ikut proaktif dalam pelaksanaan musyawarah yang dilaksanakan di desanya masing-masing sampai ke musyawarah yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten.

Dari wawancara yang telah dilakukan terhadap semua responden, sebanyak 46% responden menilai bahwa jenis kelamin merupakan faktor yang paling

mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

Tabel 4.18. Faktor Penentu Tingkat Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Pondok Kelapa

Faktor	Jumlah	Persentase (%)
1. Pendidikan	8	20
2. Pekerjaan	9	22,5
3. Jenis Kelamin	18	45
4. Latar Belakang Sosbud	5	12,5
Total	40	100

Sumber: Hasil Penelitian, 2014

Dari Tabel 4.18, didapat hasil yang menyatakan bahwa jenis kelamin merupakan faktor yang paling menentukan tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, hal ini berarti bahwa kesetaraan gender masih sangat kurang di wilayah Kecamatan Pondok Kelapa, Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukan bagi para laki-laki, perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya. Sayangnya sampai saat ini, perempuan seringkali dianggap lemah dan hanya menjadi sosok pelengkap. Terlebih lagi adanya pola berpikir bahwa peran perempuan hanya sebatas bekerja di dapur, sumur, mengurus keluarga dan anak, sehingga pada akhirnya hal di luar itu menjadi tidak penting.

Sosok perempuan yang berprestasi dan bisa menyeimbangkan antara keluarga dan karir menjadi sangat langka ditemukan. Perempuan seringkali takut untuk berkarir karena tuntutan perannya sebagai ibu rumah tangga seperti yang kebanyakan dialami oleh kaum perempuan di Kecamatan Pondok Kelapa.

Menurut Kades Pasar Pedati yang kebetulan merupakan kader perempuan yang ada di pemerintah Desa Pasar Pedati, kaum perempuan jangan terpengaruh dengan pendapat miring yang ada di masyarakat tentang perempuan yang hanya sebatas bekerja di rumah, sekarang saatnya kaum perempuan bisa disejajarkan dengan kaum laki-laki.

Menurut Kades Pasar Pedati, persoalan lain terkait perempuan adalah kurangnya partisipasi perempuan dalam berbagai forum pertemuan musyawarah Desa. Kades mengungkapkan persentase perempuan di dalam Musrenbangdes (musyawarah perencanaan dan pengembangan desa) tidak pernah lebih dari 20%, forum Musrenbangdes tidak menjadikan keterwakilan perempuan sebagai prasyarat partisipasi. Faktor teknis yang menjadi penyebab realitas ini adalah undangan disampaikan satu hari sebelumnya, pelaksanaan pertemuan tidak dijadwalkan dan mendadak, serta jam pertemuan dilakukan saat perempuan sedang sibuk di rumah.

Situasi problematik ini dihadapi oleh UU Desa yang mewajibkan masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan desa dan musyawarah yang tertuang dalam pasal 68. Partisipasi mengandung konten kesetaraan dimana setiap suara dalam pertemuan dinilai sebagai input warga negara, tidak melihat dari jenis kelamin. Namun di sisi lain, kendala dari perempuan yang telah hadir dalam forum adalah kapasitas pengambilan keputusan dan kontribusi perempuan dalam forum yang seharusnya lebih ditingkatkan, sehingga perempuan mampu merespon kebutuhan-kebutuhan strategis di dalam forum, dapat mewarnai dan mengintervensi Musrenbangdes dalam bentuk input kebijakan. Oleh karenanya, fungsi fasilitator desa yang responsif gender menjadi krusial dalam setiap pertemuan desa dan Musrenbangdes.

Oleh karenanya, kapasitas kritis yang harus dikuasai oleh pemerintah Desa, perangkat Desa, insitusi lokal, dan masyarakat Desa adalah pengetahuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang besar dan otonom,

sehingga dapat merespon kebutuhan gender secara transparan, kolaboratif dan partisipatif. Dengan demikian, pembangunan Desa yang berkeadilan dapat diwujudkan.

Dari wawancara yang dilakukan mengenai “apakah ada faktor lain yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah?”, menurut pendapat Kades Sunda Kelapa, selain faktor pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, dan latar belakang sosial budaya, terdapat faktor lain yang cukup mempengaruhi partisipasi masyarakat di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, yaitu faktor kekuasaan elit Desa. Hal ini disampaikan Kades Sunda Kelapa dari melihat situasi yang ada di sebagian Desa yang ada di Kecamatan Pondok Kelapa, beliau berpendapat bahwa masih ada dominasi dari salah seorang atau beberapa orang yang ada di Desa dalam menentukan suatu perencanaan yang ada di Desa, seperti misalnya terdapat di suatu Desa, masyarakat yang ada masih belum merasakan manfaat yang dari setiap pembangunan yang ada di Desa tersebut dikarenakan pembangunan yang dilaksanakan tidak berdasarkan aspirasi atau keinginan dari semua masyarakat, tetapi murni hanya keinginan dari seseorang yang merupakan salah satu petinggi di Desa tersebut. Hal ini sangat disayangkan mengingat pembangunan di Desa tersebut hanya mementingkan keinginan dari salah satu masyarakat saja, bukan dari keseluruhan masyarakat yang ada. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan yang lebih dari perangkat Kecamatan agar lebih mengawasi setiap pelaksanaan musyawarah dalam penentuan pelaksanaan pembangunan yang ada di setiap Desa di Kecamatan Pondok Kelapa, sehingga dapat menekan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam pengambilan keputusan dalam setiap pelaksanaan musyawarah.

Salah satu ciri dari pembangunan desa adalah partisipasi aktif dari masyarakat desa dalam proses pembangunan tersebut. dengan demikian partisipasi masyarakat perlu dibina dan terus ditingkatkan agar pembangunan desa mencapai sasaran yang diharapkan. Mengenai

pentingnya partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat, pendapat Camat Kecamatan Pondok Kelapa, pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya itu baru akan berhasil, apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh masyarakat, tidak saja dari Kades, BPD, maupun tokoh masyarakat tetapi juga dari seluruh masyarakat yang ada.

Untuk membina dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diperlukan usaha-usaha nyata dengan berbagai jalan, dengan harapan lama-kelamaan partisipasi aktif masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya. upaya dan cara untuk menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan antara lain dikemukakan oleh Camat Pondok Kelapa sebagai berikut :

1. Memberi stimulasi kepada masyarakat dengan mengharapkan timbulnya respon yang dikehendaki, antara lain dalam inpres bantuan pembangunan desa, inpres lomba desa dan sebagainya.
2. Menyesuaikan program pemerintah dengan kebutuhan (keinginan) yang telah lama dirasakan oleh masyarakat desa yang bersangkutan.
3. Menumbuhkan dan menanamkan kesadaran akan kebutuhan dan atau perlunya perubahan di dalam masyarakat dan dalam diri anggota masyarakat sedemikian rupa sehingga timbul kesediaan berpartisipasi.

Partisipasi demikian tidak datang dengan sendirinya. dibutuhkan usaha-usaha untuk menumbuhkannya dengan kemampuan, ketekunan dan waktu untuk dapat tumbuh dan berkembang.

dari pendapat di atas, dapat disimpulkan berbagai cara untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka faktor yang sangat penting diinginkan adalah partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan yaitu turut serta mengambil bagian dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan tanggung jawab atas hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

Dari wawancara mengenai “bagaimana partisipasi masyarakat jika dilihat dari: a) daftar hadir dalam musyawarah, b) banyaknya usulan yang muncul dalam musyawarah, c) peran aktif masyarakat dalam proses pemeliharaan hasil pembangunan, didapat hasil yang berbeda-beda.

Dari wawancara kepada semua responden yang ada, kebanyakan memberikan jawaban bahwa jika dilihat dari daftar hadir dalam setiap pelaksanaan musyawarah, masyarakat yang hadir kebanyakan laki-laki, hal tersebut sesuai dengan jawaban mayoritas masyarakat yang mengatakan bahwa faktor jenis kelamin merupakan faktor yang paling menentukan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Pondok Kelapa. Berdasarkan keadaan tersebut, maka perlu adanya sosialisasi secara menyeluruh dari pemerintahan Desa maupun Kecamatan dalam pelaksanaan musyawarah untuk mewajibkan adanya sebagian perwakilan perempuan dari keseluruhan peserta yang mengikuti setiap pelaksanaan musyawarah yang ada.

Dari pertanyaan tentang “bagaimana partisipasi masyarakat jika dilihat dari usulan yang muncul dalam setiap pelaksanaan musyawarah?”, juga didapat jawaban yang berbeda-beda, tetapi kebanyakan masyarakat menjawab bahwa setiap usulan yang ada sudah cukup menampung aspirasi masyarakat. Menurut Kades Pekik Nyaring, usulan dari semua masyarakat di Desa Pekik Nyaring murni merupakan usulan dari setiap perwakilan masyarakat yang ada, hal ini tertuang dalam suatu dokumen perencanaan pembangunan yang selalu direvisi setiap tahun, agar prioritas pembangunan lebih merata di setiap sektor yang ada di masyarakat. Adapun dokumen tersebut menurut Kades Pekik Nyaring, juga di perbanyak untuk di ikutkan dalam Musrenbang di tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah.

Sedangkan dari pertanyaan tentang “bagaimana partisipasi masyarakat jika dilihat dari peran aktif masyarakat dalam proses pemeliharaan hasil

pekerjaan pembangunan”, didapatkan jawaban bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Pondok Kelapa masih rendah dalam kegiatan pemeliharaan, hal ini dituturkan oleh sebagian besar responden dikarenakan pembangunan yang dilaksanakan kebanyakan bukan dari keinginan masyarakat itu sendiri, tetapi langsung dari pemertintahan Kabupaten Bengkulu Tengah. Menurut salah seorang tokoh masyarakat Desa Sidodadi, hal ini dikarenakan setiap pembangunan yang tidak berasal dari perencanaan masyarakat Desa biasanya ada biaya pemeliharaan, jadi masyarakat tidak terlalu peduli untuk ikut merawat hasil pembangunan yang dilakukan tersebut. Terkecuali jika pembangunan yang ada berdasarkan langsung dari masyarakat Desa itu sendiri, rasa memiliki terhadap pembangunan tersebut pasti sangat terasa bagi masyarakat karena dari awal perencanaan sampai ke tahap pelaksanaan semua langsung berasal dari masyarakat.

Berdasarkan pendapat diatas, diharapkan agar perencanaan pembangunan dengan meelibatkan masyarakat benar-benar dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, dikarenakan hasil yang didapatkan akan bisa dilihara oleh masyarakat Desa itu sendiri.

4.3. Implikasi Hasil Penelitian

Dalam rangka usaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dimasa yang akan datang, hasil penelitian ini bisa dijadikan patokan agar kedepannya pemerintah desa maupun daerah bisa lebih memfokuskan usaha-usaha perbaikan dalam setiap dimensi perencanaan partisipatif, khususnya dalam dimensi partisipatoris yang membutuhkan peningkatan dalam hal pemberian kesempatan yang sama terhadap semua masyarakat dan lebih berusaha meningkatkan proaktif masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam setiap perencanaan yang ada di desa masing.masing, tanpa membedakan pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, dan latar belakang sosial budaya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Setelah melakukan penelitian untuk menganalisa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah serta Mengidentifikasi faktor penentu tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. a) Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan untuk menganalisa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, jawaban terbanyak dari setiap dimensi yang ada yaitu:
 1. Fokus Pada Kepentingan Masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Pondok Kelapa masih dalam kategori yang cukup dalam merencanakan perencanaan yang berdasarkan pada kepentingan masyarakat
 2. Dari dimensi Partisipatoris, masyarakat masih kurang di beri kesempatan untuk menyampaikan sumbangan pemikiran dan ide-ide dalam setiap perencanaan pembangunan yang di laksanakan di setiap Musyawarah desa dan Kecamatan
 3. Dari dimensi dinamis, masyarakat masih kurang berpartisipasi dalam hal pelaksanaan perencanaan yang berkelanjutan dan dapat meningkatkan proaktif masyarakat
 4. Dari dimensi sinergitas, perencanaan partisipatif masih kurang melibatkan kepentingan-kepentingan para stakeholders dalam pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif tersebut tetapi kurang dalam menjamin keterlibatan semua pihak

5. Dari dimensi legalitas, perencanaan partisipatif cukup menjunjung tinggi etika dan tata nilai masyarakat yang ada di Desa masing-masing, serta masyarakat cukup berpartisipasi dalam perencanaan dengan tidak adanya peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan
6. Dari dimensi fisibilitas, perencanaan partisipatif cukup sesuai dengan spesifikasi dan ukuran yang diinginkan oleh masyarakat, serta juga perencanaan partisipatif sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

b) Dari keseluruhan dimensi yang ada, tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah adalah rendah, ini berarti tingkat partisipasi masyarakat masih kurang dalam setiap pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa maupun di Kecamatan Pondok Kelapa

2. a) Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas responden menyatakan bahwa faktor pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, dan latar belakang sosial budaya merupakan faktor penentu tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

b) Dari faktor pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, dan latar belakang budaya, 46% responden menilai jenis kelamin merupakan faktor yang paling menentukan tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah

c) Selain dari faktor pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, latar belakang sosial budaya, terdapat faktor penentu lain yaitu faktor kekuasaan elit yang ada di Desa

d) Cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah adalah:

1. Memberi stimulasi kepada masyarakat dengan mengharapkan timbulnya respon yang dikehendaki, antara lain dalam inpres bantuan pembangunan desa, inpres lomba desa dan sebagainya.
2. Menyesuaikan program pemerintah dengan kebutuhan (keinginan) yang telah lama dirasakan oleh masyarakat desa yang bersangkutan.
3. Menumbuhkan dan menanamkan kesadaran akan kebutuhan dan atau perlunya perubahan di dalam masyarakat dan dalam diri anggota masyarakat sedemikian rupa sehingga timbul kesediaan berpartisipasi.

e) Partisipasi masyarakat jika dilihat dari:

1. Daftar hadir dalam setiap pelaksanaan musyawarah, masyarakat yang hadir kebanyakan laki-laki, hal tersebut sesuai dengan jawaban mayoritas masyarakat yang mengatakan bahwa faktor jenis kelamin merupakan faktor yang paling menentukan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Pondok Kelapa
2. Banyaknya usulan yang muncul, kebanyakan masyarakat menjawab bahwa setiap usulan yang ada sudah cukup menampung aspirasi masyarakat yang ada.
3. Peran aktif masyarakat dalam proses pemeliharaan, partisipasi masyarakat di Kecamatan Pondok Kelapa masih kurang jika pembangunan yang ada bukan berasal dari keinginan masyarakat itu sendiri

5.2. Saran

Dari temuan penelitian disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu penyempurnaan tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif agar dapat dilaksanakan secara simpel dan mudah dipahami baik oleh

perangkat pemerintah desa dan kecamatan maupun masyarakat dengan tidak mengurangi prinsip-prinsip partisipatif.

2. Mengoptimalkan enam dimensi yang ada agar tercapai tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Pondok Kelapa yang lebih baik.
3. Perlu ada peningkatan pemahaman perangkat desa/kecamatan, unsur pembangunan dan unsur masyarakat mengenai mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif.
4. Pentingnya perencanaan pembangunan melalui kegiatan pelatihan atau penambahan wawasan, pendekatan yang aktif melalui kader pembangunan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
5. Perlu sosialisasi yang optimal dengan memberdayakan pemerintah Desa, Kecamatan, SKPD, dan kader pembangunan dalam pemberian informasi kepada masyarakat di Kecamatan Pondok Kelapa, Sosialisasi yang optimal ini untuk memberikan kejelasan mengenai proses perencanaan pembangunan kepada masyarakat agar mereka lebih banyak terlibat dalam proses tersebut.

5.3. Keterbatasan Penelitian

- Karena situasi dan kondisi serta keterbatasan waktu yang dimiliki, penelitian ini hanya menggunakan responden sebanyak 40 orang dari 5 desa yang ada di Kecamatan Pondok Kelapa, mungkin jumlah responden belum bisa mewakili keseluruhan masyarakat yang ada di Kecamatan Pondok Kelapa.
- Kurangnya kualitas wawancara yang dilakukan dalam penelitian dikarenakan pertanyaan yang diajukan belum dilakukan uji validitas terlebih dahulu.

5.4. Rekomendasi Untuk Penelitian Lebih Lanjut

Dengan segala keterbatasan yang telah diungkapkan sebelumnya maka peneliti memberi saran untuk penelitian selanjutnya antara lain :

- Bagi para peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut disarankan untuk menggunakan sampel yang lebih banyak
- Bagi peneliti selanjutnya juga dapat menambah periode penelitian, mungkin lebih panjang ataupun dapat memfokuskan pada periode tertentu tidak hanya satu tahun saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander, 2002, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Penerbit Pondok Edukasi, Solo
- Adi, Isbandi Rukminto, 2001, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Lembaga Penelitian FE-UI, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah, 2013, *Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Angka*
- Conyers, Diana, 1994, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hariwijaya, M, 2008, *Metodologi Dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Elematera Publishing, Yoyakarta
- Kartasasmita, Ginanjar, 1997, *Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Katz dan Seers dalam Tjokrowinoto, 1995:3, *Peran Pemerintah Desa dalam pembangunan masyarakat Desa Pesanggarahan Kota Batu*
- Muhadjir, H. Noeng, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rakesarasin, Yogyakarta
- Nazir M, 2005, *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Purnamasari, Irma, 2008, *Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi*, Tesis, Magister Ilmu Administrasi , Universitas Diponegoro, Semarang
- Riyadi dan Bratakusumah, D.S, 2004, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Robinson, Alfred, 2011, *Efektifitas Program Perencanaan Partisipatif Pembangunan Pedesaan (Study Evaluasi Program Pengembangan Fisik di Kecamatan Talo Kabupaten Seluma)*, Tesis, Magister Perencanaan Pembangunan, Universitas Bengkulu, Bengkulu

Siagian, Sondang P, 1994, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.

Todaro, Michael P, 2008, *Pembangunan Ekonomi*, Penerbit Erlangga, Jakarta

Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004, *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, Jakarta

Undang-undang Republik Indonesia No .32 Tahun 2004, *Otonomi Daerah*

.

\

HASIL JAWABAN KUESIONER RESPONDEN

HASIL JAWABAN KUESIONER RESPONDEN																				
No	Nama	Jabatan	Pertanyaan																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Eko Wardana, ST	STAFF BAPPEDA	b	a	d	c	b	c	c	c	c	b	a	a	b	b	b	d	c	c
2	Drs. Sriwidodo	CAMAT	c	b	b	b	d	a	d	d	e	c	c	a	a	c	c	d	b	b
3	Roni Alfiani, S.Sip	SEKCAM	a	d	c	d	b	c	d	c	d	d	d	c	d	c	b	b	c	c
4	Yuniaranti	STAFF PMD	a	a	a	d	b	b	d	b	c	c	d	d	d	c	c	b	b	c
5	Elfa Emalia	STAFF PMD	a	a	a	d	b	b	d	b	c	c	d	d	d	c	b	a	c	c
6	Sucipto, SE	KADES PK NYARING	b	b	b	a	b	b	c	e	d	b	b	c	c	b	a	c	a	a
7	Rahaya NK	KADES PS PEDATI	d	c	c	d	c	d	c	b	d	d	d	c	d	c	c	c	c	c
8	Prhiaty	KADES SIDODADI	d	d	b	b	a	d	b	c	b	d	c	d	c	b	a	c	a	a
9	Karyo	KADES SD KELAPA	c	b	b	c	c	c	c	d	c	b	d	c	c	c	c	c	c	c
10	Sujono	KADES SRIKUNCORO	d	d	d	b	a	c	c	d	c	c	b	b	c	b	d	c	b	d
11	Sudaryono	SEKDES PK NYARING	a	a	a	b	b	b	d	d	e	e	b	c	c	b	b	c	c	d
12	Berry Komar	SEKDES PS PEDATI	b	b	a	a	d	b	d	c	c	e	d	d	d	d	d	b	c	b
13	Hernantoni, SE	SEKDES SIDODADI	d	d	a	d	c	b	d	c	c	d	c	b	d	c	d	b	c	c
14	Abdul Hakim Ria	SEKDES SD KELAPA	c	d	d	c	b	d	d	c	e	c	c	c	d	d	d	c	c	d
15	Karyo	SEKDES SRIKUNCORO	c	d	d	c	b	d	d	c	d	c	d	d	d	d	d	c	c	c
16	Suyadi	KETUA BPD PK NYARING	c	c	c	c	b	d	b	c	d	d	c	e	e	d	c	c	c	c
17	Hamdani	KETUA BPD PS PEDATI	b	d	d	d	b	b	b	d	d	d	c	c	d	c	c	c	b	c
18	H. Baharudin	KETUA BPD SIDODADI	d	c	d	d	d	d	d	d	d	d	c	d	d	d	c	d	c	c
19	Pipit Damaiyanti	KETUA BPD SD KELAPA	c	c	d	d	d	d	c	e	d	c	d	d	d	c	c	d	c	c
20	Warono	KETUA BPD SRIKUNCORO	c	c	c	c	e	e	e	d	e	e	d	d	d	c	c	d	c	c
21	Subianto	ANGGOTA BPD PK NYAR	c	d	c	c	e	c	e	d	c	d	d	d	d	c	c	c	e	d
22	Nedi Santoso	ANGGOTA BPD PS PEDAT	c	d	c	d	d	d	d	e	b	c	d	d	d	c	c	d	e	c
23	Narso	ANGGOTA BPD SIDODADI	b	b	c	d	c	d	c	d	c	c	c	c	c	d	b	b	c	c
24	Bambang Sutrisno	ANGGOTA BPD SD KELAPA	a	a	d	b	c	d	c	d	c	c	c	b	c	b	b	b	c	c
25	Ali Kaid	ANGGOTA BPD SRIKUNC	e	d	c	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	b	e
26	Sukiono	KETUA RT PK NYARING	d	e	b	a	a	d	d	d	e	c	d	e	e	d	c	c	b	e
27	Komar	KETUA RT PS PEDATI	d	d	e	e	d	d	d	d	e	c	d	e	e	d	c	c	c	c
28	Mastono	KETUA RT SIDODADI	d	d	d	d	d	d	d	c	d	d	d	d	d	d	d	c	d	d
29	Lestariyono	KETUA RT SD KELAPA	d	e	b	c	c	c	c	e	d	c	d	e	d	d	c	b	b	d
30	Ramli	KETUA RT SRIKUNCORO	c	e	d	c	c	c	c	d	c	d	e	e	e	e	d	d	e	e
31	Yulia Christie R.N	TOPER PK NYARING	b	b	d	b	b	b	b	d	a	d	c	b	b	b	a	c	b	b
32	Sri Suparti	TOPER PS PEDATI	c	b	b	d	c	a	c	e	c	c	c	c	c	c	c	c	b	b
33	Deri	TOPER SIDODADI	b	b	b	d	c	b	d	d	c	d	c	c	c	c	c	c	b	b
34	Mardianis	TOPER SD KELAPA	a	a	d	d	a	b	c	d	e	c	c	c	c	c	a	a	b	b
35	Tati Fitri Yanti	TOPER SRIKUNCORO	b	c	c	b	e	c	d	d	c	d	c	d	d	d	c	d	e	d
36	Hasmana Kusuma	MASY. SETEMPAT PK NY	d	c	d	c	d	c	e	b	c	d	d	d	d	d	c	e	d	d
37	Adhiya Eka suputra	MASY. SETEMPAT PS PEI	d	c	c	d	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
38	Yudianto	MASY. SETEMPAT SIDOL	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	c	d	d	d
39	Hadi Sunaryo	MASY. SETEMPAT SD KE	a	a	d	d	c	c	c	d	d	c	c	c	c	c	d	a	d	c
40	Utoyo	MASY. SETEMPAT SRIKU	d	c	d	c	c	c	c	c	d	c	c	c	c	c	d	d	d	d
a : Sangat Baik			(SB)																	
b : Baik			(B)																	
c : Cukup Baik			(CB)																	
d : Kurang Baik			(KB)																	
e : Sangat Kurang Baik			(SKB)																	

a : Sangat Baik (SB)
b : Baik (B)
c : Cukup Baik (CB)
d : Kurang Baik (KB)
e : Sangat Kurang Baik (SKB)

DAFTAR PERTANYAAN

Pertanyaan ini hanya untuk kepentingan studi, oleh karenanya mohon bantuan bapak dan ibu berkenan mengisi setiap pertanyaan sesuai dengan kenyataan yang ada.

I. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Umur :
4. Pekerjaan :
5. Pendidikan Formal : a. SD b. SMP c. SMA d. Perguruan tinggi
6. Jabatan dalam lembaga :
7. Pendapatan (Rupiah/bulan) :

II. DAFTAR ANGKET PENELITIAN

No	Pertanyaan	Penilaian				
		Sangat baik (a)	Baik (b)	Cukup Baik (c)	Kurang Baik (d)	Sangat Kurang Baik (e)
	Dimensi fokus kepada kepentingan masyarakat					
1	Apakah perencanaan partisipatif berjalan dengan baik dalam mengatasi/ membantu menyelesaikan masalah masyarakat?					
2	Apakah perencanaan partisipatif berjalan dengan baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada?					
3	Apakah perencanaan partisipatif benar-benar memperhatikan aspirasi-aspirasi masyarakat yang ada?					
4	Apakah perencanaan partisipatif yang dilakukan dapat meningkatkan motivasi kelompok masyarakat dalam kegiatan perekonomian?					
5	Apakah perencanaan partisipatif dapat meningkatkan peran serta kelompok dalam kebijakan program pembangunan pedesaan?					

6	Apakah perencanaan partisipatif dapat menimbulkan rasa memiliki kelompok masyarakat terhadap hasil pembangunan tersebut?						
Dimensi partisipatoris (keterlibatan)							
7	Apakah perencanaan partisipatif berjalan dengan baik dalam hal memberikan kesempatan yang sama dalam memberikan sumbangan pemikiran tanpa ada hambatan apapun?						
Dimensi Dinamis							
8	Apakah perencanaan partisipatif berlangsung dengan baik secara berkelanjutan?						
9	Apakah perencanaan partisipatif dapat meningkatkan proaktif masyarakat?						
Dimensi Sinergitas							
10	Apakah perencanaan partisipatif berjalan dengan baik dalam hal menjamin keterlibatan semua pihak?						
11	Apakah perencanaan partisipatif berjalan dengan baik dalam hal meningkatkan kerjasama antar wilayah administrasi?						
12	Apakah perencanaan partisipatif berjalan dengan baik dalam hal memperhatikan interaksi diantara stakeholder yang ada di daerah?						
13	Apakah perencanaan partisipatif berjalan dengan baik dalam hal memperhatikan kepentingan-						

	kepentingan strategis daerah?								
Dimensi Legalitas									
14	Apakah perencanaan partisipatif berjalan dengan baik dalam hal penerapan peraturan yang berlaku?								
15	Apakah perencanaan partisipatif berjalan dengan baik dalam hal menjunjung tinggi etika dan tata nilai masyarakat?								
16	Apakah perencanaan partisipatif berjalan dengan baik dalam hal menekan peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan?								
Dimensi Fisibilitas									
17	Apakah perencanaan partisipatif berjalan dengan baik berdasarkan spesifikasi dan ukuran yang sebenarnya?								
18	Apakah perencanaan partisipatif berjalan dengan baik sesuai dengan waktu yang ditentukan?								

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

I. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
.....
2. Jenis Kelamin :
.....
3. Umur :
.....
4. Pekerjaan :
.....
5. Pendidikan Formal : a. SD b. SMP c. SMA d. Perguruan
tinggi
6. Jabatan dalam lembaga :
.....
7. Pendapatan (Rupiah/bulan) :
.....

II. PERTANYAAN

1. Apakah dari faktor berikut dapat menentukan tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah?
 - a. Pendidikan ☐ Ya ☐ Tidak
 - b. Pekerjaan ☐ Ya ☐ Tidak
 - c. Jenis Kelamin ☐ Ya ☐ Tidak
 - d. Latar Belakang Sosial Budaya ☐ Ya ☐ Tidak
2. Menurut anda, manakah faktor yang paling menentukan tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah? (urutkan dari faktor yang paling menentukan)

Alasannya:

3. Selain faktor-faktor diatas menurut anda, apakah ada faktor lain yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah?
4. Menurut anda, bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah?
5. Bagaimana partisipasi masyarakat di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah jika dilihat dari:
 - a. Daftar hadir dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan?
 - b. Banyaknya usulan yang muncul dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan?
 - c. Peran aktif masyarakat dalam proses pemeliharaan hasil pekerjaan pembangunan?